



Dampak dan Refleksivitas Sosial Pada Pegawai CV MAL Pasca PHK Massal

¹Faris Ilhamzi, ²Tiara Ramadhani, ³Herza

^{1,2,3} Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

e-mail: ilhamzifariz@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Juli 28, 2026

Revised Agustus 01, 2026

Accepted Agustus 11, 2026

Keywords:

Social Impact, Social Reflexivity, Layoffs, Risk Society

ABSTRACT

The tin trade corruption case in Central Bangka not only caused state losses but also impacted the social lives of workers who experienced layoffs (PHK), including employees of CV Mutiara Alam Lestari (CV MAL). This study aims to analyze the social impacts arising from layoffs and examine the social reflexivity carried out by workers in facing life changes. The study used a qualitative approach with descriptive methods through in-depth interviews, observation, and documentation techniques with five former CV MAL employees and five family members as triangulation informants. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions, while theoretical analysis used Ulrich Beck's Risk Society Theory. The results of the study indicate that layoffs due to the tin trade corruption case caused various social impacts in the form of loss of status and social identity as workers, changes in social interaction patterns, changes in family relationships, and the emergence of psychosocial conditions that affect individual social functioning. This study also found that workers developed social reflexivity through the process of reflection on life changes, post-layoff adjustments, strengthening family relationships, and rebuilding social relationships with the community. Based on Ulrich Beck's Risk Society Theory, corrupt practices in the tin trade constitute a form of manufactured risk that generates social risks for groups not directly involved. Social reflexivity, on the other hand, is the individual's response to adapting to the changes brought about by these risks.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Juli 28, 2026

Revised Agustus 01, 2026

Accepted Agustus 11, 2026

Keywords:

Dampak Sosial, Refleksivitas Sosial, PHK Massal, Masyarakat Risiko

ABSTRACT

Kasus korupsi tata niaga timah di Bangka Tengah tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk pegawai CV Mutiara Alam Lestari (CV MAL). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial yang ditimbulkan pasca PHK serta mengkaji refleksivitas sosial yang dilakukan oleh para pekerja dalam menghadapi perubahan kehidupan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap lima mantan pegawai CV MAL beserta lima anggota keluarga. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan analisis teoritis menggunakan Teori Masyarakat Risiko (*Risk Society*) Ulrich Beck. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK akibat kasus korupsi tata niaga timah menimbulkan berbagai dampak sosial berupa munculnya tekanan psikologis dan gangguan kecemasan, hilangnya status dan identitas sosial sebagai pekerja, serta perubahan hubungan sosial dan dinamika



keluarga. Penelitian ini juga menemukan bahwa para pekerja mengembangkan reflektivitas sosial melalui proses refleksi diri atas pengalaman pemutusan kerja, reflektivitas dalam hubungan sosial dan penguatan hubungan keluarga, serta upaya adaptasi Sosial-Ekonomi. Berdasarkan perspektif Teori Masyarakat Risiko Ulrich Beck PHK merupakan bentuk Risiko Sosial yang harus ditanggung oleh para pekerja yang terdampak, sementara reflektivitas sosial menjadi respons individu dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan yang ditimbulkan oleh risiko tersebut.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Faris Ilhamzi
Universitas Bangka Belitung
Email: ilhamzifariz@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki Potensi Ekonomi besar di dunia. Posisi geografis yang strategis membuat Indonesia memiliki karakteristik alam yang beragam. Potensi pertanian, perikanan, kehutanan serta pertambangan merupakan modal utama dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Sektor yang memiliki peran strategis dan nilai ekonomi tinggi adalah sektor pertambangan. Hasil Pertambangan yang dimiliki Indonesia antara lain batu bara, nikel, emas, bauksit, dan timah yang tersebar di berbagai daerah. Sumber daya mineral ini tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan nasional, tetapi juga menjadi tumpuan ekonomi bagi masyarakat di daerah penghasil.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah yang dikenal sebagai penghasil timah terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Sejak masa kolonial, pertambangan timah telah menjadi bagian penting dari sejarah ekonomi dan sosial masyarakat Bangka Belitung. Aktivitas pertambangan timah menjadi sumber utama penghidupan bagi banyak masyarakat lokal dan berperan besar dalam menopang perekonomian daerah. Namun, seiring dengan berkembangnya industri pertambangan dan tata niaga hasil tambang, muncul berbagai persoalan serius yang menyangkut tata kelola, transparansi, serta distribusi keuntungan dari sektor tersebut (Lelisari dkk., 2021).

PT Timah Tbk merupakan perusahaan produsen dan eksportir logam timah di Indonesia yang didirikan pada 2 Agustus 1976, yang merupakan bagian dari MIND ID (*Mining Industry Indonesia*), BUMN holding industri pertambangan. Perusahaan Timah Tbk merupakan salah satu penambang timah terlama yang ada di Pulau Bangka setelah itu barulah muncul generasi swasta baru dalam dunia pertambangan yang ada di Pulau Bangka Belitung. Kegiatan PT Timah Tbk yaitu antara lain penambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa, dengan produksi logam timah mencapai 76.400 ton pada tahun 2019 dan menjadi pemasok timah terbesar di dunia (Hartono, dkk. 2025).

Prestasi PT Timah Tbk yang menjadi pemasok timah terbesar di dunia pada tahun 2023 mulai tersandung masalah korupsi. Pada tanggal 17 Oktober 2023 juru bicara dari Kejaksaan Agung yaitu Ketut Sumedana pertama kali mempublikasikan berita terkait kasus korupsi yang menyangkut PT Timah Tbk (Sabila & Rosa, 2024). Kasus korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung menjadi sorotan utama yang menggemparkan masyarakat Indonesia karena nilai kerugiannya yang sangat besar dan berdampak luas bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Korupsi dalam tata niaga timah di Bangka Belitung telah menjadi isu yang kompleks dan



signifikan, terutama karena daerah ini dikenal sebagai salah satu penghasil timah terbesar di Indonesia. Kasus korupsi tata niaga timah ini melibatkan PT Timah Tbk (TINS) yang berlangsung dari tahun 2015 sampai tahun 2022 dengan total kerugian sebesar 271 triliun yang dihitung akibat kerusakan lahan dan lingkungan yang terjadi akibat praktik pertambangan ilegal dan sirkulasi perdagangan timah tanpa perizinan dan prosedur yang sesuai (detiknews.com). Selain itu, tersangka juga menerima uang hasil korupsi timah tersebut yang berkedok sebagai dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pada 13 Agustus 2024, terdapat 23 tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan, meliputi pengusaha dan mantan pejabat PT. Timah Tbk yang diduga terlibat dalam melakukan korupsi dalam perizinan penambang, pembelian timah, dan penjualan hasil tambang (Purnama, 2024). Salah satu nama yang terseret dalam kasus ini yaitu Thamron alias Aon. Kejaksaan Agung menyita 42 ribu ton kandungan mineral berharga senilai Rp. 216 Milyar di gudang miliknya di Bangka Tengah (Bangkapos.com). Setelah Kejaksaan Agung (KEJAGUNG) menetapkan Aon sebagai tersangka, perusahaan sawit yang merupakan milik tersangka Thamron alias Aon yaitu CV Mutiara Alam Lestari (MAL) di Kabupaten Bangka Tengah (BATENG) dilakukan pemblokiran rekening oleh Kejagung RI. CV MAL merupakan perusahaan atau pabrik yang bergerak di bidang pengelolaan tandan buah segar sawit yang sudah lama berdiri jauh sebelum terciptanya kasus korupsi tata niaga timah. CV MAL didirikan pada tahun 2007 dan kurang lebih sudah beroperasi selama tujuh belas tahun. Hal ini tentunya banyak menimbulkan tanda tanya mengapa perusahaan yang beroperasi di bidang perkebunan bisa terkena imbas dari kasus korupsi tata niaga timah. Oleh karena itu kasus korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian negara saja, tetapi juga berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Salah satu dampaknya adalah penghentian operasional CV MAL yang mengakibatkan PHK massal terhadap para pekerjanya.

Pemblokiran rekening Perusahaan sawit CV Mutiara Alam Lestari (MAL) di Kabupaten Bangka Tengah (BATENG) oleh Kejagung RI membuat terganggunya operasional dan arus kas perusahaan, sehingga manajemen memutuskan untuk melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal. CV MAL menjadi perusahaan yang terkena dampak akibat adanya praktik korupsi tata niaga timah, sehingga dapat menjadi contoh bagaimana korupsi dapat menyebabkan terganggunya stabilitas operasional perusahaan walaupun perusahaan tersebut tidak bergerak ataupun terlibat dalam korupsi timah. Kemudian, dalam hal ini tindakan cepat dari pemerintah daerah atas penutupan pabrik sawit tersebut sangat dibutuhkan, karena kondisi ini berpotensi memperburuk krisis ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami pegawai sebagai dampak dari kasus korupsi tata niaga timah tidak sekadar mengakhiri hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan, tetapi juga menciptakan guncangan terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi rumah tangga mereka. Hilangnya pekerjaan menyebabkan berkurangnya sumber pendapatan yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan kesejahteraan keluarga. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi pekerja dan keluarganya serta menimbulkan berbagai kesulitan dalam mempertahankan keberlangsungan kehidupan setelah kehilangan pekerjaan. Tekanan yang muncul setelah PHK juga dapat menjadi semakin berat ketika pekerja memiliki keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan baru atau tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menghadapi masa transisi setelah kehilangan pekerjaan. Dengan demikian, dampak PHK tidak berhenti pada hilangnya pekerjaan dan pendapatan, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan kesejahteraan yang memengaruhi kemampuan pekerja dan rumah tangga dalam mempertahankan kondisi kehidupan yang stabil (Suryamadani & Imelda, 2026). Dalam konteks penelitian ini, kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak yang muncul setelah PHK dapat meluas dari persoalan hubungan kerja menuju kehidupan rumah tangga pekerja, khususnya dalam hal keberlangsungan kesejahteraan dan kerentanan sosial-ekonomi.



Di sisi lain, dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekonomi, melainkan juga memengaruhi kehidupan sosial para pekerja yang terdampak PHK. Kasus korupsi tata niaga timah di Bangka Tengah yang melibatkan perusahaan-perusahaan dalam rantai industri pertambangan, termasuk keterkaitannya dengan PT Timah Tbk, telah membentuk persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap sektor pertambangan secara keseluruhan. Meskipun pegawai CV MAL tidak memiliki keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun praktik korupsi yang terjadi, mereka tetap menjadi kelompok yang merasakan konsekuensi sosial dari peristiwa tersebut. Dalam perspektif sosiologi, kondisi ini dapat memunculkan stigmatisasi sosial, yaitu ketika identitas pekerja tambang diasosiasikan dengan praktik korupsi dan berbagai persoalan yang menyertainya. Akibatnya, sebagian pekerja mengalami penurunan kepercayaan dari lingkungan sosial, berkurangnya peluang memperoleh pekerjaan baru akibat citra negatif yang melekat pada sektor tempat mereka pernah bekerja, serta munculnya perasaan tidak aman dalam membangun kembali kehidupan sosial dan ekonomi setelah kehilangan pekerjaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa dampak korupsi memiliki jangkauan yang lebih luas daripada sekadar persoalan hukum, karena turut memengaruhi relasi sosial, identitas, dan posisi pekerja dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil pra-survei yang dilakukan peneliti melalui wawancara pendahuluan dengan beberapa mantan pegawai CV MAL yang terdampak PHK, diperoleh informasi awal bahwa kehilangan pekerjaan tidak hanya berdampak pada berkurangnya pendapatan keluarga, tetapi juga memengaruhi dinamika kehidupan rumah tangga. Beberapa informan mengungkapkan bahwa setelah tidak lagi memiliki pekerjaan tetap, mereka harus melakukan penyesuaian terhadap pola pengeluaran keluarga, mencari sumber pendapatan alternatif, serta membagi kembali peran ekonomi di dalam rumah tangga. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa PHK massal tidak hanya menghadirkan persoalan ekonomi, tetapi juga berpotensi memengaruhi fungsi keluarga sebagai unit sosial yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan anggotanya. Meskipun demikian, informasi tersebut masih bersifat awal dan menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji lebih mendalam mengenai implikasi sosial dan bentuk refleksivitas yang dialami pegawai CV MAL pasca PHK dalam penelitian ini.

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern tidak lagi hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor alamiah, tetapi semakin didominasi oleh risiko yang dihasilkan dari proses modernisasi itu sendiri. Ulrich Beck menjelaskan bahwa perkembangan industrialisasi, kemajuan teknologi, serta sistem ekonomi modern tidak hanya menghasilkan kesejahteraan, tetapi juga melahirkan berbagai bentuk risiko baru yang bersifat sistemik dan sulit diprediksi. Risiko tersebut kemudian menyebar secara luas kepada kelompok masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam penyebab munculnya risiko tersebut (Beck, 1992). Dalam kondisi demikian, masyarakat didorong untuk melakukan refleksi terhadap perubahan yang dialaminya sebagai bentuk respons atas ketidakpastian yang dihasilkan oleh modernitas. Proses tersebut oleh Beck dipahami sebagai bagian dari *reflexive modernization*, yaitu kondisi ketika individu maupun masyarakat mulai mengevaluasi kembali cara hidup, pilihan, serta strategi yang digunakan untuk menghadapi berbagai konsekuensi dari modernisasi (Beck, 1992). Konsep ini menjadi relevan dalam penelitian mengenai pegawai CV MAL pasca PHK massal, karena kehilangan pekerjaan tidak hanya menghadirkan persoalan ekonomi, tetapi juga mendorong individu untuk membangun kembali kehidupan sosial melalui proses refleksivitas dalam menghadapi risiko sosial yang mereka alami.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono, (2017), teknik penulisan kualitatif menggambarkan fenomena yang diperoleh dari



data yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian, penelitian ini dilakukan di Kelurahan Arung Dalam, Kabupaten Bangka Tengah.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder didapatkan dari artikel jurnal, buku, dan penelitian-penelitian terdahulu. Subjek dan teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terakhir, teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan, yang meliputi pengorganisasian data, pendalaman makna, serta penarikan kesimpulan (Creswell, 2014). Maka dari itu, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah mengorganisasikan dan menyiapkan data, membaca data secara menyeluruh, melakukan proses *coding*, mengembangkan tema, menyajikan temuan dalam bentuk deskriptif naratif, menginterpretasi data, serta memvalidasi temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Sosial yang Ditimbulkan Pasca PHK Massal terhadap Pegawai CV MAL

Hasil penelitian mengenai dampak sosial yang ditimbulkan oleh kasus korupsi tata niaga timah terhadap mantan pegawai CV Mutiara Alam Lestari (CV MAL) pasca pemutusan hubungan kerja (PHK) diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima orang informan. Analisis terhadap data tersebut menunjukkan bahwa kasus korupsi tidak hanya menimbulkan implikasi pada aspek hukum dan kerugian ekonomi negara, tetapi juga menghadirkan berbagai konsekuensi sosial yang secara langsung memengaruhi kehidupan para mantan pekerja. Dampak yang dialami tidak hanya berupa hilangnya mata pencaharian, tetapi juga mencakup tekanan psikologis pasca PHK, hilangnya identitas sosial sebagai pekerja, serta perubahan dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan mengungkapkan bahwa PHK massal menjadi titik awal munculnya berbagai perubahan dalam kehidupan mereka. Hilangnya pekerjaan menyebabkan sumber pendapatan utama keluarga terputus sehingga kondisi ekonomi rumah tangga mengalami penurunan. Selain itu, para informan juga menghadapi ketidakpastian dalam memperoleh pekerjaan baru akibat terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman kerja maupun faktor usia. Situasi tersebut mendorong sebagian informan untuk beralih ke sektor pekerjaan lain, sementara sebagian lainnya memilih mengelola usaha atau kebun milik keluarga sebagai strategi mempertahankan keberlangsungan hidup.

Dampak sosial yang ditemukan dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan juga memengaruhi kondisi psikologis para informan, seperti kekhawatiran dalam memenuhi kebutuhan keluarga, tekanan akibat perubahan status sebagai pencari nafkah, serta munculnya rasa cemas terhadap masa depan. Di sisi lain, beberapa informan mengungkapkan adanya perubahan dalam hubungan sosial, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat, karena mereka harus menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi yang berubah dan membangun kembali jaringan sosial untuk memperoleh peluang pekerjaan atau sumber penghasilan baru.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kasus korupsi tata niaga timah menghasilkan konsekuensi sosial yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar kerugian finansial negara. Meskipun para mantan pegawai CV MAL tidak memiliki keterlibatan dalam praktik korupsi yang terjadi, mereka tetap menjadi pihak yang menanggung dampak dari berhentinya aktivitas perusahaan. Dengan kata lain, risiko yang muncul akibat praktik korupsi pada tingkat institusi telah meluas hingga memengaruhi kehidupan individu dan keluarga para pekerja.



1. Tekanan Psikologis dan Emosional Pasca PHK

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima mantan pegawai CV Mutiara Alam Lestari (CV MAL), diketahui bahwa dampak sosial pertama yang dirasakan setelah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memberikan dampak psikologis yang cukup besar terhadap para mantan pegawai CV Mutiara Alam Lestari (CV MAL). Kehilangan pekerjaan yang terjadi secara tiba-tiba tidak hanya menghilangkan sumber penghasilan utama, tetapi juga memengaruhi kondisi emosional para pekerja. Perasaan sedih, kecewa, cemas, stres, hingga kehilangan rasa percaya diri menjadi pengalaman yang hampir dirasakan oleh seluruh informan penelitian.

Kondisi tersebut muncul karena pekerjaan bagi para informan bukan sekadar aktivitas ekonomi untuk memperoleh pendapatan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas sosial, sumber penghargaan diri, serta simbol kemampuan mereka dalam menjalankan tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Ketika pekerjaan tersebut hilang akibat peristiwa yang berada di luar kendali mereka, para pekerja mengalami guncangan emosional yang cukup mendalam.

2. Hilangnya Status dan Identitas Sosial sebagai Pekerja

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap lima mantan pegawai CV Mutiara Alam Lestari (CV MAL), ditemukan bahwa salah satu dampak sosial yang paling dirasakan setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah hilangnya status dan identitas sosial sebagai pekerja. Bagi para informan, pekerjaan bukan hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh penghasilan, tetapi juga menjadi identitas yang melekat pada diri mereka di tengah keluarga maupun masyarakat. Status sebagai pekerja memberikan pengakuan sosial, rasa percaya diri, serta menunjukkan kemampuan individu dalam menjalankan peran sosialnya.

Kasus korupsi tata niaga timah yang menyebabkan berhentinya operasional perusahaan mengakibatkan identitas tersebut hilang secara mendadak. Seluruh informan mengungkapkan bahwa perubahan tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi, tetapi juga terlihat dalam hubungan mereka dengan keluarga dan lingkungan sekitar.

3. Perubahan Hubungan Sosial dan Dinamika Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya memengaruhi psikologis para mantan pekerja CV Mutiara Alam Lestari (CV MAL), tetapi juga membawa perubahan terhadap relasi sosial dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Kehilangan pekerjaan menyebabkan perubahan peran dalam keluarga, pola komunikasi antar anggota keluarga, hingga cara pekerja berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari menurunnya kondisi ekonomi keluarga dan munculnya tekanan psikologis yang dialami para pekerja setelah kehilangan pekerjaan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar keluarga berusaha mempertahankan hubungan yang harmonis meskipun menghadapi berbagai keterbatasan ekonomi. Akan tetapi, perubahan kondisi ekonomi menyebabkan keluarga harus melakukan penyesuaian terhadap pembagian peran, pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Dengan demikian, PHK tidak hanya menjadi persoalan individu pekerja, tetapi juga menjadi persoalan kolektif yang memengaruhi seluruh anggota keluarga.

B. Refleksivitas Sosial Pegawai CV MAL Pasca PHK Massal

Refleksivitas sosial pegawai CV MAL pasca PHK menunjukkan adanya perubahan dalam cara pekerja memahami dan memaknai kondisi kehidupannya setelah kehilangan pekerjaan. Pengalaman PHK mendorong pekerja untuk melakukan evaluasi terhadap kehidupan sebelumnya, khususnya mengenai ketergantungan terhadap pekerjaan, kepastian kehidupan, serta hubungan sosial yang dimiliki. Proses tersebut kemudian menghasilkan perubahan cara berpikir, yaitu munculnya kesadaran bahwa pekerjaan dan kondisi kehidupan tidak selalu bersifat tetap sehingga diperlukan kesiapan dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian.



Perubahan cara berpikir tersebut selanjutnya memengaruhi cara pekerja memandang masa depan. Para pekerja mulai membangun orientasi kehidupan yang lebih terbuka terhadap berbagai kemungkinan, termasuk mempertimbangkan alternatif pekerjaan dan sumber penghidupan serta meningkatkan kesiapan menghadapi kondisi yang tidak dapat diprediksi. Dengan demikian, pengalaman PHK tidak hanya dipahami sebagai kehilangan pekerjaan, tetapi juga sebagai pengalaman yang memberikan pembelajaran sosial bagi pekerja dalam menentukan pilihan dan arah kehidupan selanjutnya.

Refleksivitas juga terlihat dalam perubahan hubungan sosial pekerja. Keluarga menjadi salah satu sumber dukungan utama dalam menghadapi perubahan kehidupan, sedangkan hubungan dengan sesama mantan pegawai berkembang menjadi jaringan sosial yang memberikan dukungan emosional maupun informasi. Kesamaan pengalaman akibat PHK menciptakan rasa senasib yang mendorong terbentuknya solidaritas antarsesama mantan pekerja. Solidaritas tersebut menunjukkan bahwa respons terhadap risiko tidak hanya berlangsung pada tingkat individual, tetapi juga dapat berkembang menjadi tindakan sosial secara kolektif.

Dengan demikian, refleksivitas sosial pegawai CV MAL dapat dipahami sebagai proses yang berlangsung melalui tiga perubahan utama, yaitu perubahan cara berpikir, perubahan orientasi terhadap masa depan, dan penguatan hubungan sosial. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam membentuk kemampuan pekerja untuk menghadapi kehidupan setelah PHK. Pekerja tidak hanya menerima perubahan sebagai kondisi yang harus dijalani, tetapi melakukan evaluasi terhadap pengalaman tersebut dan menggunakannya sebagai dasar untuk membentuk pola tindakan baru.

Oleh karena itu, refleksivitas sosial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dampak sosial pasca PHK tidak berhenti pada munculnya ketidakpastian dan perubahan kehidupan, tetapi juga menghasilkan proses pembentukan kesadaran baru pada pekerja. Melalui proses refleksi tersebut, pekerja mengembangkan cara pandang yang lebih adaptif terhadap perubahan, meningkatkan perhatian terhadap keberlanjutan kehidupan, serta membangun solidaritas dengan kelompok yang memiliki pengalaman serupa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa refleksivitas menjadi salah satu bentuk respons sosial pekerja dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian yang muncul setelah PHK.

1. Refleksivitas Diri atas Pengalaman Pemutusan Hubungan Kerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya menghasilkan perubahan kondisi sosial ekonomi para mantan pegawai CV Mutiara Alam Lestari (CV MAL), tetapi juga memunculkan proses refleksi diri terhadap pengalaman hidup yang telah mereka lalui. Proses refleksi tersebut terlihat dari bagaimana para informan mengevaluasi pengalaman bekerja, memaknai kehilangan pekerjaan, serta menilai kembali pilihan-pilihan hidup yang selama ini mereka anggap sebagai sesuatu yang pasti.

Refleksi diri yang dilakukan para informan merupakan konsekuensi dari pengalaman menghadapi risiko sosial yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Sebelum kasus korupsi tata niaga timah menyebabkan perusahaan menghentikan operasionalnya, sebagian besar informan memiliki keyakinan bahwa pekerjaan di CV MAL merupakan pekerjaan yang dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka dalam jangka panjang. Akan tetapi, pengalaman kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba mengubah cara pandang tersebut dan mendorong para informan untuk mengevaluasi berbagai keputusan yang telah mereka ambil selama bekerja.

2. Refleksivitas Dalam Hubungan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kasus korupsi tata niaga timah tidak hanya mendorong para mantan pegawai CV Mutiara Alam Lestari (CV MAL) melakukan refleksi terhadap kehidupan pribadinya, tetapi juga mengubah cara mereka membangun dan mempertahankan hubungan sosial dengan orang lain.



Setelah mengalami perubahan status sebagai pekerja, para informan menyadari bahwa dukungan sosial dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitar merupakan sumber penting dalam menghadapi ketidakpastian yang mereka alami. Kesadaran tersebut mendorong munculnya berbagai bentuk refleksivitas dalam hubungan sosial, seperti memperbaiki komunikasi keluarga, membangun kembali interaksi dengan masyarakat, menjaga solidaritas dengan sesama mantan pekerja, serta memperluas jaringan sosial.

Berbeda dengan kondisi pada masa awal PHK ketika sebagian besar informan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, proses refleksi yang berlangsung secara bertahap mendorong mereka untuk kembali menjalin hubungan dengan orang lain. Hubungan sosial yang semula mengalami gangguan kemudian dipulihkan melalui komunikasi yang lebih terbuka, saling berbagi pengalaman, dan meningkatkan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa refleksivitas tidak hanya terjadi pada tingkat individu, tetapi juga tercermin dalam cara pekerja membangun kembali relasi sosialnya.

dapat dipahami bahwa refleksivitas sosial para mantan pekerja CV MAL diwujudkan melalui upaya membangun kembali hubungan sosial yang sempat terganggu akibat PHK. Refleksivitas tersebut tampak dalam meningkatnya komunikasi dengan keluarga, terjalinnya kembali hubungan dengan tetangga dan masyarakat, dipertahankannya solidaritas dengan sesama mantan pekerja, serta berkembangnya kesadaran untuk memperluas jaringan sosial. Triangulasi melalui anggota keluarga memperlihatkan bahwa perubahan tersebut tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga terlihat secara nyata dalam perilaku sosial sehari-hari.

Dalam perspektif Teori Masyarakat Risiko Ulrich Beck, refleksivitas dalam hubungan sosial merupakan bagian dari reflexive modernization, yaitu proses ketika individu mengevaluasi pengalaman menghadapi risiko dan mengubah cara mereka membangun kehidupan sosial. Risiko yang muncul akibat kasus korupsi tata niaga timah tidak hanya menyebabkan terganggunya hubungan sosial para pekerja, tetapi juga mendorong mereka untuk membangun kembali relasi sosial yang lebih adaptif dan suportif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan keluarga, solidaritas antarmantan pekerja, dan partisipasi dalam masyarakat menjadi sumber modal sosial yang memperkuat kemampuan individu menghadapi ketidakpastian.

3. Upaya Adaptasi Sosial-Ekonomi sebagai Bentuk Refleksivitas Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa refleksivitas sosial yang dilakukan oleh mantan pegawai CV Mutiara Alam Lestari (CV MAL) tidak berhenti pada proses menyadari dan mengevaluasi pengalaman kehilangan pekerjaan. Proses tersebut kemudian berkembang menjadi berbagai tindakan nyata sebagai upaya untuk mengurangi risiko ekonomi yang muncul setelah pemutusan hubungan kerja (PHK). Tindakan tersebut diwujudkan melalui pencarian pekerjaan baru, pengembangan usaha keluarga, peningkatan kemampuan diri, serta pengelolaan keuangan rumah tangga secara lebih terencana. Berbagai strategi tersebut menunjukkan bahwa para informan tidak memilih untuk tetap berada dalam kondisi ketidakpastian, melainkan berusaha membangun kembali kehidupan ekonominya melalui proses adaptasi yang bersifat reflektif.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa setiap informan memiliki strategi adaptasi yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial, usia, pengalaman kerja, serta sumber daya yang dimiliki. Meskipun demikian, seluruh strategi tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber penghasilan dan meningkatkan kemampuan keluarga dalam menghadapi risiko ekonomi pada masa mendatang.

Dalam perspektif Teori Masyarakat Risiko Ulrich Beck, tindakan tersebut merupakan bentuk nyata dari reflexive modernization, yaitu proses ketika individu secara sadar mengevaluasi pengalaman menghadapi risiko, kemudian menyusun strategi baru yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat modern. Risiko yang berasal dari praktik korupsi tidak hanya menghasilkan kerugian bagi pekerja, tetapi juga memicu lahirnya tindakan reflektif berupa



diversifikasi sumber penghasilan, penguatan modal sosial, peningkatan kompetensi, dan pengembangan usaha mandiri.

Lebih lanjut, Beck menjelaskan bahwa masyarakat modern dituntut untuk membangun kemampuan mengelola risiko secara mandiri karena institusi formal tidak selalu mampu memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang muncul. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa para mantan pekerja CV MAL telah melakukan proses tersebut melalui berbagai bentuk adaptasi ekonomi yang disesuaikan dengan sumber daya yang mereka miliki. Dengan demikian, reflektivitas sosial tidak hanya tampak dalam perubahan cara berpikir, tetapi juga tercermin dalam tindakan konkret yang memungkinkan individu dan keluarganya membangun kembali stabilitas ekonomi setelah mengalami PHK.

Sebagai sintesis, penelitian ini memperlihatkan bahwa pengalaman kehilangan pekerjaan akibat kasus korupsi tata niaga timah telah mendorong para mantan pekerja CV MAL untuk mengembangkan berbagai strategi adaptasi ekonomi sebagai bentuk reflektivitas sosial. Upaya mencari pekerjaan baru, memanfaatkan jaringan sosial, meningkatkan kompetensi, mengembangkan usaha kebun sawit, serta memperbaiki pengelolaan keuangan keluarga merupakan indikator bahwa pekerja tidak berhenti sebagai korban risiko, tetapi bertransformasi menjadi aktor yang secara aktif membangun ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian yang dihasilkan oleh masyarakat risiko.

C. Analisis Temuan Penelitian dalam Perspektif Teori Masyarakat Risiko Ulrich Beck

Berdasarkan temuan penelitian, dampak yang dialami pekerja tidak terbatas pada hilangnya pekerjaan sebagai aktivitas ekonomi, melainkan berkembang menjadi perubahan dalam identitas sosial, pola interaksi dengan lingkungan, hubungan dalam keluarga, serta cara individu memaknai kehidupannya setelah mengalami perubahan status sebagai pekerja.

Keseluruhan temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi memiliki konsekuensi yang meluas terhadap struktur kehidupan sosial masyarakat. Para pekerja CV MAL berada pada posisi sebagai pihak yang tidak terlibat dalam praktik korupsi, namun harus menanggung berbagai dampak sosial akibat terhentinya operasional perusahaan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa suatu penyimpangan yang terjadi pada tingkat kelembagaan dapat menghasilkan konsekuensi sosial yang menjangkau kelompok masyarakat yang berada di luar proses terjadinya penyimpangan tersebut.

Fenomena tersebut dapat dipahami melalui Teori Masyarakat Risiko yang dikemukakan oleh Ulrich Beck. Menurut Beck (1992), masyarakat modern ditandai oleh munculnya berbagai risiko yang diproduksi oleh aktivitas manusia. Berbeda dengan risiko tradisional yang berasal dari faktor alam, risiko dalam masyarakat modern lahir sebagai konsekuensi dari perkembangan sistem ekonomi, politik, teknologi, maupun tata kelola kelembagaan. Risiko tersebut tidak hanya memengaruhi pihak yang menciptakannya, tetapi juga menyebar kepada kelompok lain yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung.

Dalam konteks penelitian ini, praktik korupsi tata niaga timah merupakan bentuk risiko yang diproduksi melalui penyimpangan dalam tata kelola sumber daya alam. Risiko tersebut berkembang menjadi persoalan yang lebih luas ketika penghentian operasional perusahaan mengakibatkan para pekerja kehilangan status sosial sebagai pekerja, mengalami perubahan hubungan sosial, serta harus menyesuaikan diri terhadap kondisi kehidupan yang baru. Dengan demikian, korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai faktor yang menghasilkan risiko sosial bagi masyarakat.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa dampak sosial yang dialami pekerja mencakup hilangnya status dan identitas sosial, perubahan pola interaksi dengan lingkungan, perubahan relasi dalam keluarga, serta munculnya kondisi psikososial yang memengaruhi keberfungsian sosial individu. Pekerjaan yang sebelumnya menjadi sumber identitas dan pengakuan sosial tidak lagi dimiliki setelah terjadinya PHK. Akibatnya, para pekerja mengalami proses



penyesuaian terhadap perubahan posisi sosial yang mereka alami. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hilangnya pekerjaan juga berarti berubahnya peran sosial yang selama ini dijalankan oleh individu dalam keluarga maupun masyarakat.

Menurut Beck, salah satu karakteristik masyarakat risiko adalah terjadinya distribusi risiko yaitu penyebaran dampak risiko kepada kelompok yang sering kali tidak memiliki kemampuan untuk menghindari maupun mengendalikan risiko tersebut. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa para mantan pekerja CV MAL merupakan kelompok yang menerima distribusi risiko tersebut. Mereka tidak memiliki keterlibatan dalam praktik korupsi, tetapi menjadi pihak yang mengalami perubahan sosial sebagai akibat dari keputusan-keputusan yang terjadi pada tingkat kelembagaan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa risiko dalam masyarakat modern memiliki karakter yang melampaui batas individu maupun organisasi sehingga konsekuensinya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa para pekerja tidak sepenuhnya berada pada posisi pasif dalam menghadapi berbagai perubahan sosial tersebut. Pengalaman kehilangan pekerjaan mendorong mereka melakukan proses refleksi terhadap kehidupan yang selama ini dijalani. Refleksi tersebut terlihat dari perubahan cara memandang pekerjaan, meningkatnya penghargaan terhadap hubungan keluarga, tumbuhnya kesadaran akan pentingnya dukungan sosial, serta berkembangnya upaya untuk membangun kembali hubungan dengan masyarakat. Proses tersebut menunjukkan bahwa individu tidak hanya menerima risiko sebagai konsekuensi yang harus ditanggung, tetapi juga melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupannya.

Dalam perspektif Beck, kondisi tersebut menggambarkan proses modernisasi refleksif yaitu proses ketika individu maupun kelompok secara kritis mengevaluasi pengalaman menghadapi risiko dan menggunakan pengalaman tersebut sebagai dasar untuk membangun cara hidup yang lebih adaptif. Modernisasi refleksif tidak dipahami sebagai upaya menghilangkan risiko, melainkan sebagai kemampuan masyarakat untuk belajar dari risiko dan melakukan penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang dihasilkan oleh kehidupan modern.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa refleksivitas sosial para mantan pekerja CV MAL berkembang melalui pengalaman menghadapi perubahan status sosial. Refleksivitas tersebut tidak hanya tercermin pada perubahan cara berpikir, tetapi juga pada perubahan perilaku sosial, seperti membangun komunikasi yang lebih terbuka dalam keluarga, memperkuat solidaritas dengan sesama mantan pekerja, meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, serta membangun kembali rasa percaya diri setelah kehilangan status sebagai pekerja. Dengan demikian, refleksivitas sosial menjadi mekanisme yang memungkinkan individu mempertahankan keberfungsian sosialnya meskipun berada dalam kondisi yang penuh ketidakpastian.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam proses refleksivitas sosial. Dukungan emosional, komunikasi yang lebih intensif, serta penerimaan keluarga terhadap perubahan status pekerja menjadi faktor yang membantu individu beradaptasi dengan kondisi baru. Selain keluarga, hubungan dengan sesama mantan pekerja dan masyarakat sekitar turut berkontribusi dalam membangun kembali rasa percaya diri serta memperkuat integrasi sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan individu dalam menghadapi risiko tidak hanya bergantung pada kapasitas personal, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas hubungan sosial yang dimilikinya.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat dipahami bahwa hubungan antara korupsi, risiko sosial, dan refleksivitas sosial membentuk suatu rangkaian proses yang saling berkaitan. Praktik korupsi menghasilkan risiko yang berdampak pada penghentian operasional perusahaan, kemudian berkembang menjadi perubahan dalam kehidupan sosial pekerja. Perubahan tersebut selanjutnya mendorong individu melakukan refleksi terhadap pengalaman yang dialaminya dan membangun berbagai bentuk penyesuaian sosial sebagai upaya



mempertahankan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, reflektivitas sosial muncul sebagai respons terhadap risiko yang dihasilkan oleh sistem sosial modern.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Teori Masyarakat Risiko Ulrich Beck mampu menjelaskan hubungan antara PHK massal, munculnya dampak sosial, dan terbentuknya reflektivitas sosial pada mantan pegawai CV MAL setelah PHK massal. Teori ini menunjukkan bahwa risiko yang diproduksi oleh sistem sosial tidak hanya menimbulkan konsekuensi terhadap aspek kelembagaan, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial individu yang berada di luar proses terjadinya risiko tersebut. Pada saat yang sama, teori ini menjelaskan bahwa individu memiliki kapasitas reflektif untuk menafsirkan pengalaman menghadapi risiko, membangun kembali hubungan sosial, serta menyesuaikan diri terhadap perubahan yang dihasilkan oleh masyarakat modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak dan refleksitas sosial pada pegawai CV MAL pasca PHK massal, dapat disimpulkan bahwa PHK massal tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan perubahan sosial dalam kehidupan pekerja. Perubahan tersebut terlihat pada hilangnya status dan identitas sebagai pekerja, perubahan pola interaksi sosial, serta dinamika hubungan dalam keluarga. Meskipun demikian, dukungan keluarga dan lingkungan sosial menjadi faktor penting dalam membantu pekerja menghadapi kondisi pasca PHK. Disisi lain, para mantan pegawai CV MAL menunjukkan reflektivitas sosial melalui proses mengevaluasi pengalaman, memaknai kembali pekerjaan, memperkuat hubungan keluarga, solidaritas dengan sesama mantan pekerja, serta kembali terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat. Proses tersebut menunjukkan bahwa pekerja tidak sepenuhnya pasif dalam menghadapi dampak PHK, tetapi mampu menyesuaikan diri dan membangun kembali identitas serta jaringan sosialnya.

Dengan demikian, dampak sosial dan reflektivitas sosial merupakan dua proses yang saling berkaitan. PHK massal menimbulkan perubahan dalam kehidupan sosial pekerja, sementara reflektivitas menjadi mekanisme yang memungkinkan mereka beradaptasi, membangun kembali hubungan sosial, dan mempertahankan keberfungsian sosial dalam menghadapi kondisi kehidupan yang baru.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat perlu memperkuat kebijakan perlindungan tenaga kerja yang terdampak oleh permasalahan hukum dan ekonomi perusahaan. Selain itu, diperlukan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan kerja, serta perluasan kesempatan kerja bagi pekerja yang mengalami PHK agar mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam guna mencegah terulangnya kasus korupsi yang dapat menimbulkan dampak sosial yang luas bagi masyarakat.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan perlu menerapkan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance), transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh aktivitas usaha. Selain itu, perusahaan perlu menyiapkan mekanisme perlindungan terhadap pekerja ketika terjadi krisis atau gangguan operasional agar dampak yang ditimbulkan tidak sepenuhnya



dibebankan kepada pekerja dan keluarganya. Pemenuhan hak-hak pekerja pasca PHK juga harus menjadi perhatian utama sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Bagi Masyarakat dan Pekerja

Para pekerja perlu meningkatkan kapasitas diri melalui pengembangan keterampilan dan diversifikasi sumber pendapatan agar tidak bergantung pada satu jenis pekerjaan. Penguatan jaringan sosial, solidaritas komunitas, serta pemanfaatan peluang usaha alternatif juga penting dilakukan sebagai strategi menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa depan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih berfokus pada pengalaman pekerja CV MAL pasca PHK massal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji dampak yang lebih luas terhadap keluarga pekerja, masyarakat sekitar perusahaan, maupun kondisi ekonomi lokal secara keseluruhan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan yang berbeda atau mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak sosial dari PHK massal terhadap para pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Beck, U. (1997). *The reinvention of politics: Towards a theory of reflexive modernization. Theory, Culture & Society*, 14(1), 1–33.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terjemahan Ahmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hananto, M. R., & Lie, G. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Pada Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor 361/PDT. SUS PHI/2023/PN. JKT. PST)*. *UNES Law Review*, 6(4), 10711-10722.
- Lelisari, L., Hamdi, H., & Imawanto, I. (2021). Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2), 404-421.
- Sabila, A. V., & Rosa, Y. Y. (2024). *Telaah Kasus Korupsi PT. Timah dan Penerapan Sanksi Pidana Khusus*. *Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 54 - 59.
- Suryamadani, A., & Imelda, J. D. (2026). Pekerja terdampak PHK dalam kerangka sistem perlindungan sosial. *Jurnal Impresi Indonesia*, 5(6), 2932–2941.